



KEUANGAN NEGARA

TIM PENGAJAR :

1. Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si. *
2. Thalita Rifda Khaerani, S.AP., M.Si.

Literatur :

1. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah – **Suparmoko, 2002.**
2. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan – **Mudrajad Kuncoro,**
3. Pengelolaan Keuangan Daerah – **Abdul Halim & Muhammad Iqbal, 2012.**
4. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah – **Chabib Soleh & Heru Rochmansjah, 2010.**



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah :

Setelah menyelesaikan mata kuliah Keuangan Negara pada akhir semester, mahasiswa mampu menghubungkan sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan negara dan daerah dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik.



Mengulas Sejarah Perkembangan Ekonomi INDONESIA



HOW



Dengan memperhatikan **pokok-pokok pikiran** yang mendasari perkembangan **ekonomi setiap era pemerintahan.**

TUJUAN PEMERINTAH UNTUK BIDANG EKONOMI

Meningkatkan **TARAF HIDUP** bangsa

DICERMINKAN OLEH CIRI :

Masyarakat yang

ADIL

equity



MAKMUR

growth

Dapatkah **ADIL & MAKMUR** dicapai
bersama-sama ???



TIDAK MUDAH

“justru seringkali menjadi suatu **TRADE OFF**”

Karena terjadi atas
landasan teori ekonomi yang berbeda



Perbandingan **TEORI EKONOMI**



TEORI PERTUMBUHAN

Mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan *trickledown effect* secara otomatis.

Penerapan SISTEM DONASI atau SISTEM PERPAJAKAN PROGRESIF bagi golongan berpendapatan tinggi.

Penerapan SISTEM SUBSIDI bagi golongan miskin.

Golongan miskin / berpenghasilan rendah akan mendapat “citratan penghasilan” dari golongan berpendapatan tinggi.

TEORI KEADILAN



Pemerataan
Pendapatan &
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar yang adil dan
merata menjadi
kehendak awal.

Dengan maksud
agar tidak terjadi
KECEMBURUAN
SOSIAL MAUPUN
EKONOMI.

Akibatnya,

Tiap orang memiliki **SEMANGAT TINGGI**
untuk membangun taraf hidup yang
lebih tinggi bersama-sama.

TEORI PERTUMBUHAN yang disertai KEADILAN



*GROWTH WITH
EQUITY*

Dikehendakinya
perbaikan taraf
hidup sekaligus
secara adil

Umumnya, laju
pertumbuhan ekonomi
menjadi lebih rendah,
namun disertai dengan
keadilan / pemerataan
penghasilan &
kesempatan yang lebih
baik.



Perkembangan Ekonomi

Masa Orde Lama (1946 – 1966)

Dalam masa kepemimpinannya, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisme. Keadaan ekonomi secara umum mengalami STAGFLASI (stagnasi & inflasi).

Situasi perekonomian yang sangat penting:

1. Kegiatan sektor pertanian & industri manufaktur terhenti karena keterbatasan kapasitas produksi & infrastruktur pendukung.
2. Penerapan kebijakan anti investasi asing.
3. Nasionalisasi perusahaan asing (terutama milik Belanda) pada tahun 1951.
4. Penggabungan semua bank milik pemerintah → Bank Berjuang, sebagai wujud gagasan ekonomi terpimpin.
5. Inflasi sangat tinggi, mencapai 300 – 500% per tahun, akibat beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
6. Neraca ekonomi nasional pada tahun 1955-1965 defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga harus melakukan pinjaman luar negeri.



Dalam masa kepemimpinannya, Soekarno berfokus pada perjuangan di ARENA POLITIK saja: sistem politik tidak stabil, sering berganti kabinet. Masalah-masalah ekonomi tidak menjadi perhatian utama.

Perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik yang dipicu Soekarno, walaupun angkatan kerja (pengangguran) menurun sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta

Kebijakan yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian INA:

1. Pemutusan hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk mengisolir Indonesia dari penerimaan bantuan-bantuan asing yang sangat dibutuhkan negara yang baru merdeka.
2. Terjadi hiperinflasi yang berada di luar kendali akibat pencetakan uang besar-besaran.

Perkembangan Ekonomi

Masa Orde Baru

Tahun 1966 s/d Mei 1998



Thn
1966

Orba mewarisi kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan dengan tingkat inflasi tinggi (600% per tahun), hutang luar negeri US\$ 2M & prasarana ekonomi yg buruk, sehingga disebut **TINGKAT KEMUNDURAN EKONOMI**.

Periode **PEMBANGUNAN EKONOMI ORBA:**



1966
s/d
1973



Soeharto melakukan PEMULIHAN EKONOMI dengan cara:

1. REINTEGRASI INDONESIA ke dalam ekonomi dunia dengan kembali bergabung dengan IMF (*International Monetary Fund*), PBB dan Bank Dunia. Tetapi menjauhi pengaruh ideologi komunis.
2. MEMERANGI HIPERINFLASI dengan mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi utk menciptakan stabilitas harga. Mencukupkan stok pangan (beras) & mekanisme pasar bebas diterapkan melalui implementasi UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 & UU Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968.

1974 s/d
1982

PERTUMBUHAN EKONOMI YG CEPAT (> 10% sejak tahun 1968) tercipta akibat OIL BOOM pada 1973-1974 ketika OPEC memotong ekspornya secara drastis yang menyebabkan harga minyak dunia naik dan pada 1978-1979 ketika Revolusi Iran mengganggu produksi minyak & harganya meningkat tajam.

OIL BOOM mengurangi ketergantungan Indonesia pada investasi-investasi asing. Namun awal 1980-an, harga minyak jatuh.

Soeharto MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI dengan cara:

1. Perekonomian diarahkan ulang dari ketergantungan terhadap minyak kepada sektor swasta yang kompetitif yang berorientasi pada pasar ekspor.
2. Iklim investasi bagi para investor swasta diperbaiki melalui kebijakan pembebasan bea cukai impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Investasi asing yang berorientasi pada ekspor disambut khusus.
3. Pada sektor keuangan, bank-bank swasta baru diijinkan untuk didirikan. Bank-bank yang sudah ada bisa membuka cabang di seluruh negeri dan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta.

1983
s/d
1996

Ekspor produk-produk manufaktur menjadi mesin perekonomian Indonesia, menciptakan Produk Domestik Bruto tumbuh rata-rata 9% per tahun (1988-1991), lalu turun menjadi 7% (1991-1994) & naik lagi hingga 1996.

Thn
1997

Gaya kepemimpinan Orba mengimplikasikan konsekuensi berbahaya menyebabkan terjadinya KRISIS MONETER – KRISIS EKONOMI – KRISIS POLITIK. Tingkat inflasi menjadi tinggi, 100% per tahun.

POKOK PIKIRAN EKONOMI

Masa Orde Baru



TRILOGI PEMBANGUNAN

Stabilitas

Pertumbuhan

Pemerataan

STABILITAS POLITIK
& EKONOMI

Pelita I
(1969-1974)

PERTUMBUHAN EKONOMI
diikuti Pemerataan & Stabilitas
Pelita II (1974-1979)

PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
diikuti Pertumbuhan
& Stabilitas
Pelita III - V
(1979-1994)

PRIORITAS pada PEMBANGUNAN EKONOMI

PRESTASI PEMBANGUNAN EKONOMI

Masa Orde Baru



**HYPERINFLASI
LENYAP**

MODAL yg henggang ke
luar negeri menjadi arus
masuk modal swasta yg
substansial

**Mengubah
DEFISIT
CADANGAN
DEVISA
menjadi selalu
positif**

**Mempertahankan
HARGA BERAS &
meningkatkan
produksi beras
hingga mencapai
TINGKAT
SWASEMBADA**

**Menciptakan
PERTUMBUHAN
EKONOMI YG
BERKELANJUTAN &
menurunkan JUMLAH
PENDUDUK MISKIN**

KELEMAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Masa Orde Baru

Tujuan PEMERATAAN
TIDAK TERCAPAI karena
rezim tidak benar-benar
mengupayakannya.

Sebagian besar pejabat
pemerintah &
konglomerat sebagai
PARTNER
PEMBANGUNAN
melakukan KORUPSI

KESENJANGAN
EKONOMI antara
golongan kaya &
miskin semakin lebar.

Jabatan & kesempatan
kerja **TERBUKA** bagi
KRONI sehingga
membentuk pola
hubungan yg KOLUSIF &
NEPOTISMIK, yang
akhirnya bermuara pada
KORUPSI

Perkembangan Ekonomi

Masa Reformasi

21 Mei 1998 s/d Okt 1999



Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti sebagai Presiden, menunjuk Wakil Presiden BJ. Habibie sebagai penggantinya di depan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi dan gedung DPR saat itu diambil alih oleh mahasiswa.

Penyerahan kekuasaan kepada BJ. Habibie menandai detik-detik TRANSISI POLITIK DI INDONESIA, dimana hampir semua aspek kehidupan sangat memerlukan adanya reformasi total.

1. Kebijakan bidang ekonomi diarahkan untuk mengatasi krisis ekonomi.
2. Kebijakan dalam bidang pers diarahkan pada pemberian kesempatan bagi pers untuk melakukan kritik terhadap pemerintah secara objektif & berimbang.

Pola sistem pemerintahan & kebijakan tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan & kebijakan Orba.

Pejabat negara pada masa reformasi sebagian besar masih eks pejabat & pihak2 yg banyak mendapat 'rejeeki' selama masa Orba.

Masih kuatnya budaya kroni dan pewarisan mental Orba mengakibatkan tdk terjadi perbaikan ekonomi negara, melainkan justru perekonomian merosot pertumbuhannya sebesar 14% per tahun.

TIDAK ADA PERUBAHAN YG NYATA DALAM PEREKONOMIAN



POKOK PIKIRAN EKONOMI

Masa Reformasi



UU 22/1999 ttg
Pemerintahan
Daerah

UU 25/1999
ttg Perimbangan Keuangan
antara Pusat & Daerah

Namun, KONDISI PEREKONOMIAN JUGA BELUM MEMBAIK :

Tingkat bunga deposito dinaikkan sesuai saran IMF sekitar 67% per tahun, mengakibatkan banyak bank menjadi pailit & dilikuidasi (beku operasi), banyak perusahaan tutup karena kondisi pasar tdk menentu & tanpa tenaga beli. PHK pun merajalela, walau mereka diberi pesangon yg cukup. Pengangguran meningkat. Kurs devisa adalah Rp.8.000 per AS\$.



Tetapi, kondisi pasar barang konsumsi tidak banyak terpengaruh. Justru sektor properti, transportasi udara & laut yg banyak terpengaruh akibat terlalu tingginya kurs devisa yg mengakibatkan kegiatan impor berhenti & kegiatan produksi sektor pabrikan maupun transportasi dlm negeri pun terganggu.



Contoh Kasus :

Perusahaan penerbangan SEMPATI gulung tikar, GARUDA & MERPATI yang mengurangi jumlah Penerbangan & tarif angkutan yang terpaksa dinaikkan.

Namun, kegiatan angkutan KA mendapat manfaat besar karena pergeseran permintaan bidang transportasi dari udara ke darat.



Namun, karena Habibie merupakan bagian dari lingkaran kekuasaan Soeharto, maka peralihan kekuasaan kepada Habibie tetap tidak dikehendaki oleh kelompok pro demokrasi.

Maka kemudian, Habibie mengagendakan Pemilu untuk mengakhiri KETIDAKPASTIAN POLITIK. Pemilu pertama pasca lengsernya rezim Soeharto berlangsung pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik.

HASIL PEMILU 1999 :

1. Membentuk komposisi anggota parlemen yang berimbang dari berbagai kekuatan politik yang ada.
2. Menutup kesempatan Habibie menjadi Presiden karena Habibie dinilai gagal dalam sesi laporan pertanggungjawaban dalam sidang parlemen.
3. Parlemen menilai Habibie tidak mampu mengatasi 3 persoalan besar : masalah sistemik, masalah transisional dan masalah konsensual.
4. Dibentuklah kepemimpinan nasional yang baru : Gus Dur – Megawati untuk periode 1999-2004

Perkembangan Ekonomi

Masa Otonomi Daerah

20 Okt 1999 s/d 22 Juli 2001



Merupakan pemerintahan yang terbebani dengan aplikasi konsep / sistem OTODA yang diwariskan dari rezim sebelumnya.

Thn
2000

Proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%.

Laju inflasi dan tingkat suku bunga rendah, yang mencerminkan bahwa kondisi moneter dalam negeri mulai stabil.

Namun, ketenangan masyarakat tidak berlangsung lama akibat sikap dan ucapan kontroversial yang membingungkan para pelaku bisnis.



Sikap diktator dan praktek KNK di lingkungan pemerintahan semakin intensif, bukan semakin berkurang. Padahal tujuan gerakan reformasi salah satunya adalah memberantas KNK.

- 2 susunan Kabinet dalam 10 bulan pertama pemerintahan Gus Dur :
1. Pada masa Kabinet I kebutuhan akan desentralisasi Otoda makin menggema & ditanggapi dengan dibentuknya **Kantor Menteri Negara Otoda**.
 2. Pada masa Kabinet II Kantor Menteri Negara Otoda digabung menjadi satu dengan Mendagri.

POKOK PIKIRAN EKONOMI

Masa Otonomi Daerah

10 Prioritas Program Ekonomi



1. Pengembangan stabilitas sektor finansial.
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan.
3. Pengembangan UKM.
4. Peningkatan produktivitas & kesejahteraan petani.
5. Pemulihan ekonomi berdasarkan investasi.
6. Peningkatan ekspor.
7. Privatisasi BUMN yg bernilai tambah.
8. Desentralisasi fiskal.
9. Optimalisasi pemanfaatan SDA.
10. Restrukturisasi perbankan & dunia usaha.



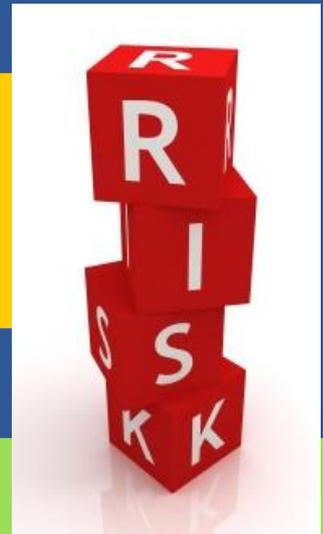
Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan SARA terus berlanjut, diantaranya : Pemberontakan Aceh, konflik Maluku, dan pertikaian etnis di Kalimantan Tengah, demonstrasi buruh dan pertikaian elit politik semakin besar.

Hubungan pemerintah dengan IMF juga tidak baik, karena masalah amandemen UU No.23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, penerapan Otda terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi RAPBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya.

IMF pun menunda pencairan bantuannya, padahal roda ekonomi nasional sangat tergantung pada bantuan IMF.



Terjadi ketidakstabilan politik dan sosial yang mengakibatkan Pemerintahan Gus Dur berhasil menaikkan tingkat **COUNTRY RISK INDONESIA**.



Gus Dur yg kontroversial 'terguling' melalui kasus **BRUNEIGATE & BULOGGATE**, sehingga digantikan kemudian oleh **Megawati** pada 23 Juli 2001.



Masa Otonomi Daerah Kepemimpinan Megawati

23 Juli 2001 s/d 20 Okt 2004

Masalah yg dihadapi umumnya masih warisan pemerintahan Orde Baru, yaitu masalah krisis ekonomi & penegakan hukum.

UU No.22 Thn 1999 direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Thn 1999 direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah: **BERFOKUS PADA PERBAIKAN SEKTOR PERBANKAN & EKONOMI MASYARAKAT UMUM.**



Bdg
Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi relatif rendah karena kurang berkembangnya investasi swasta maupun penanaman modal asing.

PRESTASI PEMBANGUNAN EKONOMI

Masa MEGAWATI



1. Menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US\$.
2. Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp.8.500,- sehingga inflasi dapat distabilkan di bawah 10%.
3. Privatisasi BUMN dgn melakukan penjualan saham Indosat shg utang luar negeri berkurang dlm rangka menekan nilai inflasi & meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Memperbaiki kinerja ekspor yang meningkat karena jumlah cadangan devisa meningkat.
5. Perekonomian stabil & pertumbuhan ekonomi naik mencapai 5%.
6. Penduduk miskin turun menjadi 18% padahal sebelumnya 28%.
7. Membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengatasi korupsi dan menciptakan UU Terorisme.

Privatisasi BUMN

Penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas dengan saham paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara RI, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dlm rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara & masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (UU Nomor 19 Tahun 2003 ttg BUMN)

Privatisasi BUMN menjadi dana baru untuk pertumbuhan, sumber APBN dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat.

TUJUAN



Meningkatkan kinerja, nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Cara Privatisasi BUMN berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2010 :

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal,
2. Penjualan saham negara secara langsung kepada investor,
3. Penjualan saham negara kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Syarat suatu BUMN bisa melakukan privatisasi :

- a) Memerlukan bantuan dan keahlian teknis,
- b) Membutuhkan dana yang besar untuk pengembangan usaha tetapi terhalang keterbatasan dana Pemerintah,
- c) Mendorong kelanjutan pengembangan aset melalui kerjasama dengan mitra strategis.

Maka, Pemerintah tidak bisa semena-mena melakukan Privatisasi BUMN. Sebelumnya tentu telah dilakukan analisis menyeluruh terkait dengan rencana privatisasi.

Privatisasi BUMN \neq Privatisasi bagi Perusahaan Swasta, sebab pengertiannya berbanding terbalik.

Bdg
Politik

Melaksanakan Pemilu tahun 2004 dalam dua periode :

- Pemilihan anggota legislatif secara langsung,
- Pemilihan Presiden & Wakil Presiden secara langsung.

Hasil Pemilu menempatkan SBY & Jusuf Kalla sebagai pemenang.



Masa Otonomi Daerah Kepemimpinan SBY

21 Okt 2004 s/d 2009, & s/d 2014



Merupakan pemerintahan pertama yang dihasilkan dari mekanisme demokrasi secara langsung.

Kebijakan-kebijakan Kontroversial :

1. Pengurangan subsidi BBM / kenaikan harga BBM akibat naiknya harga minyak dunia.
2. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan & kesehatan.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), BOS, yg pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
4. Program ekonomi masyarakat kecil melalui PNPM Mandiri dan Jamkesmas, yg pelaksanaannya belum sesuai target.

Kebijakan yg ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Diadakan **INDONESIAN INFRASTRUCTURE SUMMIT** pada November 2006, yang mempertemukan para investor dgn kepala-kepala daerah.

UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 direvisi lagi menjadi UU No. 12 Tahun 2008.



Masalah hukum terjadi terkait bencana alam seperti tsunami Aceh, gempa Yogya, jatuhnya Adam Air, lumpur Lapindo di Sidoarjo. Memunculkan UU No.24 Thn 2007 ttg Penanggulangan Bencana Alam

Keberhasilan Perekonomian :

1. Sejak tahun 2005-2009 inflasi berhasil ditekan pada *single digit*. Dari 17,11% tahun 2005 menjadi 6,96% tahun 2009.
2. *Tagline* strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment* mewujudkan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta tahun 2005 menjadi 31,02 juta pada 2010.
3. Peningkatan konsumsi masyarakat yg merupakan imbas dari pertumbuhan PDB memberi efek pada peningkatan kapasitas produksi di sektor rill yg membuka banyak lapangan kerja baru.

Memasuki tahun kedua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunan berupa *Master Plan* Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) utk hingga tahun 2025.



Masa Otonomi Daerah

Kepemimpinan Jokowi

21 Okt 2014 s/d 2019, & s/d 2024

KEBIJAKAN PERDANA :

1. **Kartu Indonesia Sehat (KIS)**
2. **Kartu Indonesia Pintar (KIP)**
3. **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**
4. **Kebijakan di Papua** : Inpres Nomor 9 Tahun 2017 ttg Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 11 Des 2017.



Kebijakan Ekonomi Jokowi

Kebijakan Ekonomi Jokowi terdiri atas :
Paket Ekonomi Jilid I hingga XIV



Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I – 9 September 2015:

1. **Mendorong daya saing industri nasional** melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum di birokrasi & kepastian usaha.
2. **Mempercepat proyek strategis nasional** dengan menghilangkan berbagai hambatan dlm pelaksanaan & penyelesaian proyek strategis nasional.
3. **Meningkatkan investasi di sektor properti** khususnya utk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II – 29 September 2015:

Berfokus pada upaya peningkatan investasi :

1. Kemudahan layanan investasi tiga jam,
2. Pengurusan *tax allowance* dan *tax holiday* lebih cepat,
3. Pembebasan pungutan PPN utk impor alat transportasi,
4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat,
5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi eksportir,
6. Perampangan ijin sektor kehutanan.



Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III – 7 Oktober 2015:

Berfokus pada upaya memperbaiki & mempermudah iklim usaha, memperjelas pengurusan perijinan & syarat berusaha di INA:

1. Penurunan tarif atau harga (BBM & tarif listrik PT. PLN),
2. Penyederhanaan ijin pertanahan utk kegiatan penanaman modal.
3. Perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV – 15 Okt 2015 :
**Berfokus pada persoalan upah buruh,
Kredit Usaha Rakyat (KUR) &
lembaga persoalan pembiayaan ekspor.**

- Bertujuan agar terbuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Sistem formulasi upah minimum juga menjadi bukti kehadiran negara dlm bentuk pemberian jaringan pengamanan sosial.



**Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V
– 22 Oktober 2015 :**
**Berfokus pada pemberian insentif
pajak bagi individu atau badan
usaha yang ingin melakukan
REVALUASI ASET.**

**“Penilaian kembali aset
tetap perusahaan akibat
adanya kenaikan nilai aset
tetap di pasaran /
rendahnya nilai aset tetap
dlm laporan keuangan
perusahaan = Cermin nilai
& kemampuan perusahaan
yg sebenarnya”**

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI – 6 Nov 2015: Berfokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



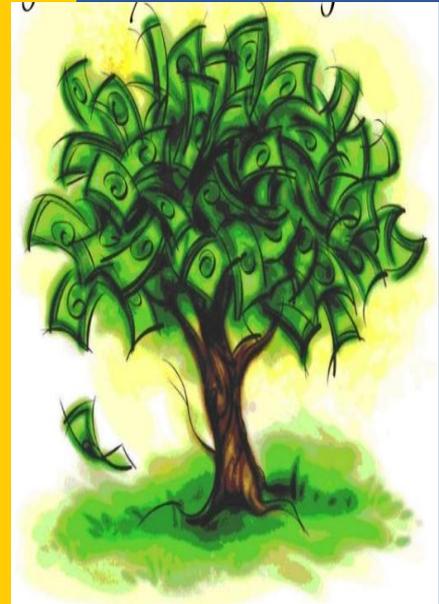
Dikembangkan melalui :
Penyiapan kawasan yg memiliki keunggulan geoekonomi & geostrategi dan berfungsi utk menampung kegiatan industri, ekspor, impor & kegiatan ekonomi lain yg memiliki nilai ekonomi tinggi & daya saing internasional.

Adalah kawasan dgn batas tertentu yg tercakup dalam daerah / wilayah utk menyelenggarakan fungsi perekonomian & memperoleh fasilitas tertentu.



KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA

- KEK Sektor Pariwisata: Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten.
- KEK Sektor Industri Hilir: Sei. Mangkel, Simalungun, Sumatera Utara.
- KEK Sektor Industri Pertambangan, Pengolahan & Manufaktur: Palu, Sulawesi Tengah.
- KEK Sektor Industri Perikanan & Pengolahannya: Bitung, Sulawesi Utara.
- KEK Sektor Industri Pengolahan, Manufaktur, Logistik & Pariwisata: Pulau Morotai, Maluku Utara.
- KEK Sektor Industri & Petrokimia: Tangjung Api-api, Banyuasin, Sumatera Selatan.
- KEK Sektor Pariwisata: Mandalika, Lombok Tengah, NTB.
- KEK Sektor Industri & Logistik: Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
- KEK Sektor Pengolahan, Logistik, Industri & Pariwisata: Arun Lhokseumawe, Aceh.



Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII:

Berfokus pada kemudahan pengurusan sertifikat tanah terutama utk UMKM & keringanan pajak penghasilan bagi pegawai yg bekerja pada industri padat karya selama 2 tahun.



Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII :

1. Kebijakan satu peta nasional,
2. Kebijakan ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri,
3. Kebijakan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat.



Paket Kebijakan Ekonomi:



JILID IX

Berfokus pada :

1. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Stabilisasi pasokan dan harga daging sapi
3. Pengembangan logistik dari desa ke global.

JILID X

Berfokus pada :

Penambahan 19 bidang usaha yg dicadangkan utk UMKM dlm revisi Perpres No.39 Thn 2014 ttg Daftar Bidang Usaha yg Terbuka dan Tertutup.

JILID XI & XII

Berfokus pada :

Menyentuh sektor yg melibatkan pengusaha kecil maupun industri dgn Kredit Usaha Rakyat berorientasi ekspor, fasilitas pajak penghasilan & Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Paket Kebijakan Ekonomi:

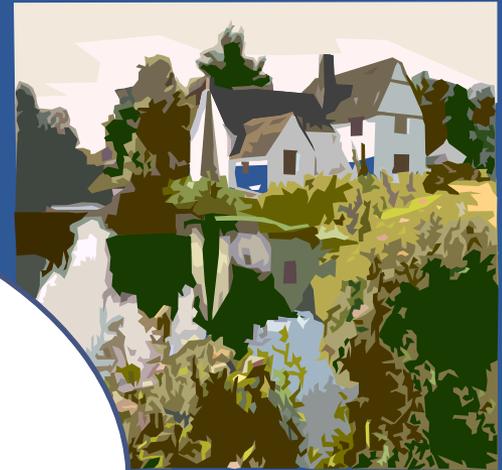
JILID XIII

Berfokus pada :
Perumahan utk masyarakat berpenghasilan rendah.

JILID XIV

Berfokus pada :

Pembuatan pada jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik utk membangun pranata & ekosistem perniagaan yg lebih efisien.



INTI Paket Kebijakan Ekonomi 2017:

1. **Kebijakan Perpajakan** ; mendukung ruang gerak perekonomian, disamping sebagai sumber penerimaan. Shg bersifat sebagai insentif utk stimulus perekonomian.
2. **Kebijakan Belanja** ; memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif & prioritas utk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yg lebih tepat sasaran & penguatan desentralisasi fiskal.
3. **Kebijakan Pembiayaan** ; memperkuat daya tahan & pengendalian resiko dgn menjaga defisit dan rasio utang.

Pada kurun waktu 2014 – 2018, utang jatuh tempo yang dibayarkan pemerintah mencapai **Rp.1.628 T** :

- Rp.237 T (2014),
- Rp.226,26 T (2015),
- Rp.322,55 T (2016),
- Rp.350,22 T (2017),
- Rp.492,29 T (2018).

Walaupun menggenjot pembangunan infrastruktur habis-habisan, **kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi justru menurun jadi 19%**, dimana pada era Soeharto mencapai 30%.



KESIMPULAN :

Tidak ada koneksi kuat antara infrastruktur yang dibangun dengan pertumbuhan dari industri.



KEBIJAKAN TAHUN 2019 yang Menggegerkan



1. Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.
2. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
3. Program Kartu Pra Kerja.
4. Pemberian grasi atau pengurangan masa hukuman bagi terpidana kasus korupsi.
5. Penandatanganan Surat Presiden mengenai Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
6. Penolakan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK setelah UU KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR RI periode 2014-2019.

CATATAN RASIO UTANG Indonesia



Indonesia mencatatkan penurunan rasio utang di era pemerintahan beberapa presiden. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan proporsi utang terhadap total aset yang dimiliki negara.

RASIO UTANG
57,7%

SOEHARTO
Lengser pada Mei 1998 meninggalkan utang Indonesia sebesar Rp 551,4 T



RASIO UTANG
85,4%

BJ HABIBIE
Periode 1999 total utang mencapai Rp 938,8 T



2000
88,7% Rp 1.232,8 T

2001
77,2% Rp 1.271,4 T



ABDURRAHMAN WAHID

2002
Rp 1.223 T 67,2%

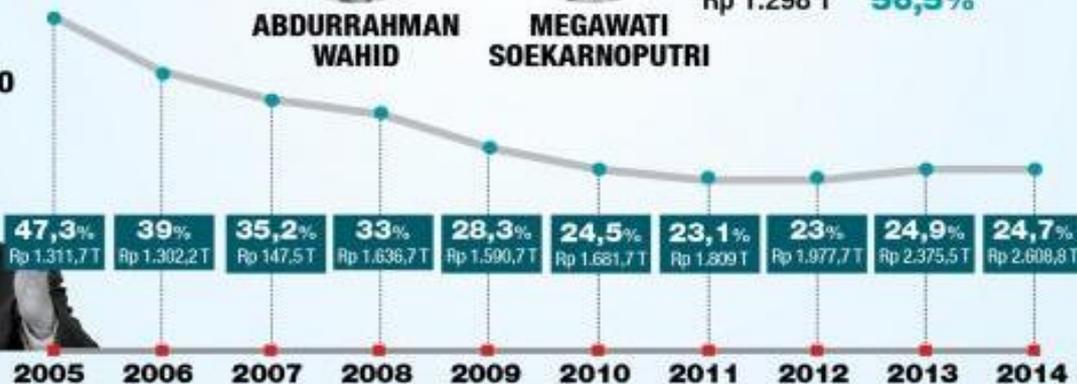
2003
Rp 1.230 T 61,1%

2004
Rp 1.298 T 56,5%



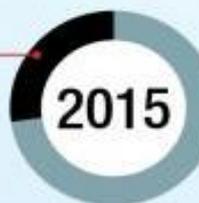
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



RASIO UTANG
27,4%

Total Utang
Rp 3.165,2 T



2015



JOKO WIDODO



2016

RASIO UTANG
27,5%

Total Utang
Rp 3.466,9 T

UTANG INDONESIA



2018

Rasio Utang
29,91%

Total Utang
Rp.4.395,97 T

Sept 2019

Rasio Utang
36,2%

Total Utang
Rp.5.534 T

2020

Rasio Utang
38,8%

Total Utang
Rp.5.877 T

Sept 2021

Rasio Utang
41,05%

Total Utang
Rp.6.711 T

PEMBERI UTANG TERBESAR BAGI INDONESIA per Oktober 2021:

1. Bank Dunia, melalui IBRD (*International Bank for Reconstruction & Development*).
2. Negara-negara kreditur: Singapura, AS, Jepang, Tiongkok, Hongkong, Asia Lainnya dan Korea Selatan (US\$ 63.902 – 6.516).



UTANG INDONESIA

Nov 2022
Rasio Utang
38,65%
Total Utang
Rp.7.554,25 T

**Surat Berharga
Negara (SBN)**
88,66% = Rp.6.697,83 T

**Pinjaman Luar
Negeri**
11,34% = Rp.856,42 T

SBN Domestik
Rp.5.297,81 T:

- Surat Utang Negara Rp.4.317,74
- Surat Berharga Syariah Negara Rp.980,08 T

SBN Valuta Asing
Rp.1.400,02 T:

- Surat Utang Negara Rp.1.066,68
- Surat Berharga Syariah Negara Rp.333,24 T

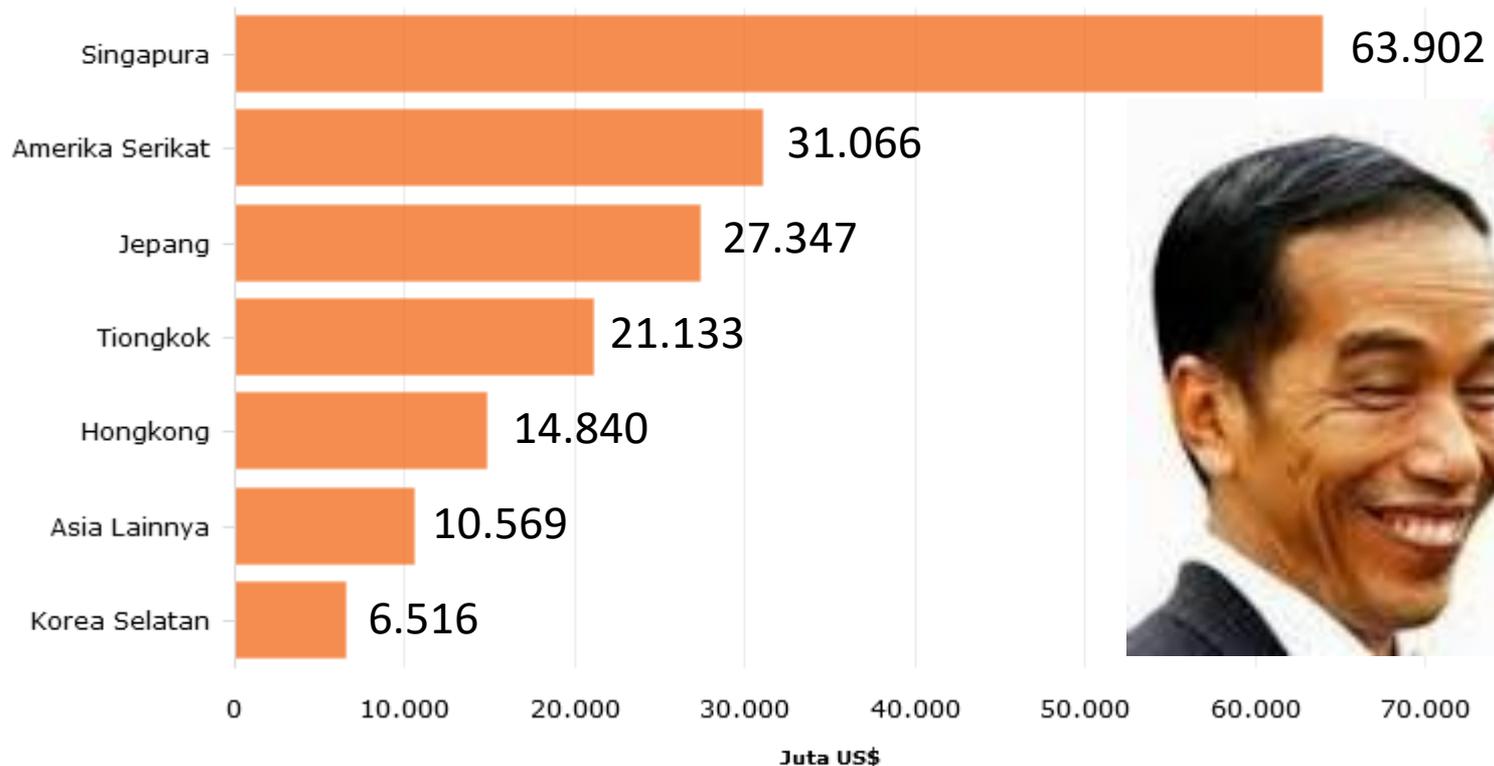
- **Bilateral** Rp.278,06 T
- **Multilateral** Rp.510,35 T
- **Commercial Bank** Rp.50,49 T

NEGARA-NEGARA PEMBERI UTANG INDONESIA



Negara Pemberi Utang Luar Negeri Terbesar Kepada Indonesia (Agustus 2021)

Sumber : Bank Indonesia (BI), 15 Oktober 2021



UTANG INDONESIA



Pengamat Ekonomi :

“Selama ini pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembangunan dengan berutang”.

“Setiap utang yang dihimpun pemerintah dari masa ke masa memiliki fokus pemanfaatan berbeda-beda”.

Era SOEHARTO :

Pembangunan infrastruktur.

Era HABIBIE, GUS DUR &

MEGAWATI : Penggunaan utang belum cukup signifikan dampaknya karena masa jabatan yg singkat.

Era SBY : Memperbesar alokasi subsidi bagi masyarakat, terutama sektor energi.

Era JOKOWI : Pembangunan infrastruktur.

DISTRIBUSI ALOKASI UTANG INDONESIA :

1. 19,06% ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
2. 16,6% ke sektor konstruksi,
3. 16,1% ke sektor pendidikan,
4. 15,4% ke sektor administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib,
5. 13,2% ke sektor jasa keuangan dan asuransi.

UTANG INDONESIA

Dilihat dari sejarah utang sejak **ORDE BARU** hingga kini :

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN
2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA :**

**Batas maksimal utang
negara adalah sebesar
60% terhadap PDB**



**MESKIPUN NILAI UTANG
NAIK,
RASIO UTANG
PEMERINTAH INDONESIA
THD PRODUK DOMESTIK
BRUTO (PDB) MASIH JAUH
DARI BATAS MAKSIMAL
UTANG NEGARA**



**New
Trend**



Terima Kasih



*Selamat
menjalani
UAS*